

**DAMPAK STATUS AKREDITASI SEKOLAH, SARANA
PRASARANA DAN KOMPETENSI SOSIAL TERHADAP DISIPLIN
KERJA GURU SD KECAMATAN KEDUNGTUBAN BLORA**

TESIS

Diajukan Kepada

Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Universitas
Muhammadiyah Surakarta untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Pendidikan



Oleh :

SUMARNO

NIM.: Q.100080047

**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2010**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Permasalahan kedisiplinan khususnya kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil, hingga saat ini masih mendapat sorotan yang tajam dari masyarakat. Sebagai contoh yang banyak dilansir media massa baik cetak maupun elektronik, menyebutkan adanya PNS meninggalkan tempat tugas tanpa ijin pimpinan. Berbagai sanksi terhadap pegawai yang terkena razia penegakan disiplin telah dikenakan sanksi kedisiplinan. Pelanggaran maupun permasalahan kedisiplinan pegawai telah menghambat fungsi pelayanan pemerintah akibat adanya oknum PNS yang tidak menjalankan tugasnya secara optimal. Sebagai contoh di Makasar pada tahun 2009, tercatat 48 PNS diantaranya adalah guru telah dijatuhi hukuman 22 diantaranya dijatuhi hukuman berat (Anonim, 2010). Di Semarang pada operasi penegakan disiplin pegawai negeri sipil (PNS) tahun 2009, dari 13 yang terjaring operasi penegakan disiplin yang dilakukan oleh petugas yang terdiri atas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Badan Pengawas Daerah (Bawasda) 10 diantaranya adalah guru (Permana, 2009: 1).

Kedisiplinan guru dan pegawai merupakan sikap penuh kerelaan dalam mematuhi semua aturan dan norma yang ada dalam menjalankan tugasnya sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap pendidikan anak didiknya. Karena bagaimana pun seorang guru atau tenaga kependidikan (pegawai), merupakan

cermin bagi anak didiknya dalam sikap atau teladan, dan sikap disiplin guru dan tenaga kependidikan (pegawai) akan memberikan warna terhadap hasil pendidikan yang jauh lebih baik (Starawaji, 2009: 1).

Kecenderungan lain yang terjadi di lapangan terkait dengan kedisiplinan guru sebagaimana hasil survey yang dilakukan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Surakarta 1, pada pertengahan bulan Agustus 2004, menunjukkan adanya berbagai persoalan. Persoalan-persoalan itu antara lain; para guru dalam melaksanakan tugas mengajar tidak berbekal pada persiapan perangkat mengajar seperti : program tahunan, program catur wulan, analisis materi pelajaran, satuan pembelajaran, rencana pembelajaran dan sebagainya. Disamping itu, terdapat kecenderungan gejala rendahnya kinerja guru yang ditunjukkan dari pelaksanaan tugas yang tidak optimal, seperti: kurang disiplin mengajar, fungsi dan tugas pokok guru belum terlaksana secara maksimal, orientasi tugas mendidik belum tersentuh dengan baik. Selain itu, guru lebih sekedar melaksanakan tugas mengajar yang dilakukan dengan cara mereka memberikan tugas-tugas kepada para siswa dalam mengisi waktu tatap muka di kelas (Hadi, 2005: 5).

Disiplin sangat penting artinya bagi kehidupan manusia, karena itu, ia harus ditanamkan secara terus-menerus agar disiplin menjadi kebiasaan. Orang-orang yang berhasil dalam bidang pekerjaan, umumnya mempunyai kedisiplinan yang tinggi, sebaliknya orang yang gagal umumnya tidak disiplin. Disiplin merupakan suatu proses latihan dan belajar untuk meningkatkan kemampuan dalam bertindak, berfikir dan bekerja yang aktif dan kreatif. Disiplin juga merupakan suatu kepatuhan dari orang-orang dalam suatu organisasi terhadap peraturan-

peraturan yang telah ditetapkan sehingga menimbulkan keadaan tertib (Fauzi, 2009: 1).

Pada prinsipnya menurut pasal (5) UU No. 43 tahun 1999, “Setiap Pegawai Negeri wajib mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku”. Pimpinan mempunyai peran yang sangat penting karena peranan pimpinan sangat menentukan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan. Banyak upaya yang dilakukan pimpinan agar tujuannya tercapai dengan hasil maksimal, salahsatunya yaitu dengan pembinaan dan peningkatan disiplin kerja pegawai. Namun masih terlihat suasana ketidakdisiplinan yang dilakukan oleh PNS (Putri, 2007: 1).

Bagi aparatur pemerintahan disiplin mencakup unsur-unsur ketaatan, kesetiaan, kesungguhan dalam menjalankan tugas dan kesanggupan berkorban, dalam arti mengorbankan kepentingan pribadi dan golongan untuk kepentingan negara dan masyarakat. Pasal 29 UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999 dinyatakan bahwa: Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, maka untuk menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, diadakan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam Peraturan Disiplin PNS diatur ketentuan-ketentuan mengenai: Kewajiban, larangan, Hukuman disiplin, Pejabat yang berwenang menghukum, Penjatuhan hukuman disiplin, Keberatan atas hukuman disiplin, Berlakunya keputusan

hukuman disiplin. Dengan adanya peraturan tersebut setiap pegawai negeri sipil termasuk guru wajib mentaati segala peraturan tersebut, namun pada kenyataannya banyak pegawai negeri sipil, khususnya guru yang melakukan pelanggaran disiplin diantaranya dalam bentuk ketidak tepatan waktu datang dan pulang kerja, pelanggaran terhadap pelaksanaan tugas, dan tidak mentaati peraturan yang berlaku (Anonim1, 2009: 1).

Status Akreditasi sekolah merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, melalui keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah. Dalam keputusan tersebut dengan tegas menunjuk seluruh sekolah agar diakreditasi, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Sebelumnya Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 020/Kep/1983, menyebutkan bahwa akreditasi hanya untuk sekolah swasta. Akreditasi sekolah adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan dan kinerja suatu sekolah berdasarkan kriteria (standar) yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh badan akreditasi sekolah yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan. Adapun tujuan akreditasi sekolah sesuai dengan keputusan Mendiknas Nomor 087/U/2002 adalah: (1) Memperoleh gambaran kinerja sekolah yang dapat digunakan sebagai alat, (2) pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu pendidikan, (3) Menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan.

Dengan adanya akreditasi sekolah diharapkan adanya peningkatan tanggung jawab guru dan disiplin kerja guru, sehingga pada gilirannya kualitas sekolah juga

akan semakin baik, dan sekolah yang berkualitas akan menghasilkan lulusan yang baik dan memiliki prestasi belajar yang tinggi. Akreditasi sekolah dilakukan melalui penilaian terhadap kinerja dan kelayakan sekolah, terutama terkait dengan sembilan fokus utama penilaian, yaitu: (1) Kurikulum/ proses belajar mengajar, (2) Manajemen sekolah, (3) Organisasi/kelembagaan sekolah, (4) Sarana dan prasarana, (5) Ketenagaan, (6) Pembiayaan, (7) Peserta didik/siswa, (8) Peranserta masyarakat, (9) Lingkungan/kultur sekolah.

Selain adanya ketentuan status akreditasi sekolah, sarana dan prasarana yang merupakan sarana bantu guru dalam pembelajaran mempunyai arti penting dalam meningkatkan disiplin kerja guru, karena dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap secara moral guru dituntut untuk mampu menggunakan peralatan yang ada dengan baik, bila guru tidak mampu menggunakan sarana dan prasarana dengan baik, maka guru akan kehilangan simpati siswa. Oleh sebab itu dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap kemungkinan guru berusaha untuk melaksanakan pembelajaran lebih baik dan berusaha untuk menyesuaikan dengan lingkungan sekolah.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa guru adalah pendidik profesional. Seorang guru atau pendidik profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D4), menguasai kompetensi, memiliki sertifikat pendidik,

sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik adalah kompetensi sosial. Kompetensi Sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidikan, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Dengan kompetensi sosial yang dimiliki diharapkan guru dapat berinteraksi dengan semua pihak baik dengan siswa, kepala sekolah, orang tua maupun masyarakat. Peran yang dibawa guru dalam masyarakat berbeda dengan profesi lain. Oleh karena itu, perhatian yang diberikan masyarakat terhadap guru pun berbeda dan ada kekhususan terutama adanya tuntutan untuk menjadi pelopor pembangunan di daerah tempat guru tinggal.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa disiplin kerja guru merupakan harapan bagi setiap siswa dengan adanya disiplin yang dimiliki oleh guru sedikit-tidaknya dapat berpengaruh langsung kepada kepribadian siswa, guru merupakan tokoh sentral dalam pendidikan, sehingga apapun yang dilakukan oleh guru akan berdampak pada perilaku siswa. Namun menerapkan disiplin kepada setiap guru bukanlah hal yang mudah.

Dari uraian diatas, dapat diartikan bahwa status akreditasi, sarana dan prasarana dan kompetensi sosial kemungkinan dapat meningkatkan disiplin kerja guru. Untuk itu dalam penelitian ini akan dikaji dampak status akreditasi sekolah, sarana dan prasarana dan kompetensi sosial terhadap disiplin kerja guru SD di Kecamatan Kedungtuban Blora.

B. Pembatasan Masalah

1. Penelitian ini terfokus pada pengujian pengaruh status akreditasi sekolah, sarana dan prasarana dan kompetensi sosial terhadap disiplin kerja guru
2. Waktu penelitian terbatas, yaitu antara bulan Maret sampai dengan Mei 2010
3. Objek penelitian terbatas di Sekolah Dasar yang ada di Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora
4. Subjek Penelitian terbatas pada guru Sekolah Dasar yang ada di Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah dan pembatasan masalah tersebut di atas, maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Adakah dampak status akreditasi, sarana prasarana, dan kompetensi sosial terhadap disiplin kerja guru Sekolah Dasar di Kecamatan Kedungtuban Blora?
2. Adakah dampak status akreditasi terhadap disiplin kerja guru Sekolah Dasar di Kecamatan Kedungtuban Blora?
3. Adakah dampak sarana dan prasarana terhadap disiplin kerja guru Sekolah Dasar di Kecamatan Kedungtuban Blora?
4. Adakah dampak kompetensi sosial guru terhadap disiplin kerja guru Sekolah Dasar di Kecamatan Kedungtuban Blora?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Umum

Untuk menganalisis dan mengkaji dampak status akreditasi sekolah, sarana prasarana, dan kompetensi sosial terhadap disiplin kerja guru sekolah dasar di Kecamatan Kedungtuban Blora.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk menganalisis dan mengkaji dampak status akreditasi terhadap disiplin kerja guru sekolah dasar di Kecamatan Kedungtuban Blora.
- b. Untuk menganalisis dan mengkaji dampak sarana dan prasarana terhadap disiplin kerja guru sekolah dasar di Kecamatan Kedungtuban Blora.
- c. Untuk menganalisis dan mengkaji dampak kompetensi sosial guru terhadap disiplin kerja guru sekolah dasar di Kecamatan Kedungtuban Blora.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai masukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kedungtuban, dan kepala sekolah Sekolah dasar dalam upaya peningkatan kedisiplinan guru.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah literatur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, khususnya Program Magister Manajemen Pendidikan.